

## **PELATIHAN KHUSUS MENGHASILKAN PENDIDIKAN INKLUSIF YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

**Sri Sarjana<sup>1</sup>, Mahsa Amira Anindya Najib<sup>2</sup>, Innayah Kusuma Dewi<sup>3</sup> & Nur Khayati<sup>4</sup>**  
 e-mail: [srisarjana@gmail.com](mailto:srisarjana@gmail.com)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

<sup>2</sup> Universitas Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>4</sup> SMA Negeri 1 Cikarang Utara

e-mail: [srisarjana@gmail.com](mailto:srisarjana@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Pentingnya mengupayakan suasana belajar yang menyenangkan, mengoptimalkan kemampuan guru, serta menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman menjadi bagian penting dalam pengembangan proses belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang sistem pendidikan berkebutuhan khusus. Peserta didik dalam sistem pendidikan inklusif selayaknya diberikan kesempatan dengan proses belajar sesuai kemampuan dirinya sendiri karena akan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu sumber daya utama di sekolah yang memiliki kemampuan dalam menangani anak dengan kebutuhan khusus harus bekerja lebih baik sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk mengoptimalkan sistem pendidikan di sekolahnya. Kurikulum sekolah sebaiknya direvisi dan diperbaiki untuk mengakomodasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus karena memiliki model belajar yang berbeda sehingga diharapkan perlunya perubahan sesuai kebutuhan. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa guru membutuhkan pelatihan khusus terkait dengan peran dan kontribusinya dalam pendidikan inklusif agar dapat membantu proses belajar bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih efektif dan efisien.

**Kata kunci:** pendidikan inklusif, berkebutuhan khusus, pembelajaran efektif, pelatihan khusus

The importance of seeking a pleasant learning atmosphere, optimizing the ability of teachers, and creating a comfortable school environment is an important part of developing the learning process for students with special needs. This study aims to obtain a true picture of the education system with special needs. Students in the inclusive education system should be given the opportunity to learn according to their own abilities because it will be closely related to the achievement of learning objectives. Teachers as one of the main resources in schools who have the ability to handle children with special needs must work better so that they have high motivation to optimize the education system in their schools. The school curriculum should be revised and improved to accommodate students who have special needs because they have different learning models so it is hoped that changes are needed according to needs. The findings of this study conclude that teachers need special training related to their role and contribution in inclusive education in order to help the learning process for students with special needs become more effective and efficient.

**Keywords:** inclusive education, special needs, effective learning, special training

### **1. Pendahuluan**

Pendidikan menjadi salah satu bagian hak asasi bagi setiap insan termasuk bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa atau yang memiliki kebutuhan khusus (Nugroho & Mareza, 2016). Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi realita hidup. Salah satu bekal utama bagi peserta didik adalah pendidikan dan kemampuan dalam bersosialisasi di masyarakat. Pola pendidikan dengan melakukan pencampuran siswa difabel dengan nondifabel maka dipersepsikan peserta didik dibiasakan untuk menerima berbagai keberagaman

sebagai bagian dari realita hidup (Somad, 2016). Menurut Osakwe (2010) sistem pendidikan sekarang menghadapi tuntutan untuk meningkatkan standar, mengembangkan keterampilan sosial dan personal, memperbaiki kurikulum, memperhatikan kesempatan pendidikan yang sama dan mempersiapkan anak muda untuk lebih cepat dalam mengubah dunia.

Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun telah memperlihatkan sikap terhadap keberlangsungan pendidikan terutama bagi anak dengan kebutuhan khusus melalui implementasi peraturan yang tertuang dalam pendidikan inklusif di Indonesia khususnya termuat pada pasal 32 Undang-undang No. 20 tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini berkaitan tentang sistem pendidikan khusus sebagai bagian dari sistem pendidikan untuk peserta didik dengan tingkat kesulitan selama melaksanakan proses belajar mengajar dikarenakan adanya kelainan secara fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Selain itu, pendidikan inklusi perlu dilakukan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi atau bakat istimewa sebagai salah satu aturan formal dalam upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia melalui penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009. Konsep, implementasi, serta strategi dalam upaya menyelenggarakan pendidikan inklusif belum banyak dipahami oleh berbagai sekolah saat ini (Murniarti & Anastasia, 2016). Upaya untuk mengembangkan potensi bagi siswa berkebutuhan khusus perlu mendapatkan bantuan yang memiliki relevansi dengan kemampuan yang dimilikinya dan mengeliminir hambatan yang dimiliki (Diahwati, Hariyono & Hanurawan, 2016).

Anak dengan kebutuhan khusus seharusnya layak dalam memperoleh berbagai akses dengan kondisi sama dalam mendapatkan pendidikan yang memiliki kualitas dan berpotensi untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Anak berkebutuhan khusus mencakup semua anak yang gagal mendapatkan manfaat dengan adanya pendidikan di sekolah. Anak muda yang memiliki disabilitas atau dikenal sebagai berkebutuhan khusus diantaranya mulai yang paling miskin sampai yang terpinggirkan. Diperkirakan terdapat sekitar 180 sampai 220 juta pemuda penyandang disabilitas di seluruh dunia dan diperkirakan 80% diantaranya berada di negara berkembang (PBB, 2011). Hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuannya ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat untuk memperoleh penghasilan karena mereka sangat bergantung pada orang lain dalam bentuk meminta sedekah atau dengan cara mengemis.

Diperkirakan sedikitnya 200 juta orang dan 18 juta orang diantaranya adalah penyandang disabilitas yang mengungsi akibat pengaruh iklim pada tahun 2050 dimana mereka membutuhkan perubahan lingkungan belajar dalam suatu bentuk yang sesuai dengan pembelajarannya (Rabassa & Olivier, 2011). Pendidikan inklusif harus didorong oleh pemerintah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembelajaran, sosialisasi dan pengembangan seluruh anak yang memiliki disabilitas (Chika, 2011). Siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum dapat memberikan kesempatan belajar di alam, membantu meningkatkan rangsangan dan dapat meningkatkan diterimanya serta diberikan apresiasi dari adanya perbedaan yang ada (Ajuwon, 2008). Hal ini memungkinkan bagi lingkungan belajar yang dapat merangsang bagi penyandang disabilitas serta dengan adanya guru yang tersedia terkait dengan pelatihan dan pengelolaan bagi kebutuhan yang berbeda.

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan sebagai cara untuk mengimplementasikan konsep pendidikan bagi semua pihak melalui upaya menyatukan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di lingkungan pembelajaran bersama-sama dengan siswa dengan kondisi yang normal (Murniarti & Anastasia, 2016). Model pendidikan sebagai bagian dari pendidikan inklusif dengan memberikan peluang bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus bersama peserta didik lain yang memiliki kondisi normal (Suryaningrum, Ingarianti, & Anwar, 2016). Pendidikan inklusif sering diasumsikan hanya berlaku bagi anak penyandang cacat. Pandangan yang keliru menyatakan bahwa pendidikan inklusif hanya berlaku bagi anak penyandang cacat akan tetapi selayaknya untuk semua anak dengan kebutuhan berbeda dalam lingkup pembelajaran. Keberadaan sistem dalam penerapan pendidikan inklusif bagi anak sebagai upaya untuk memperoleh pendidikan tanpa unsur yang perlu dibeda-bedakan (Handayani & Rahadian, 2013). Okobah (2007) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai program untuk semua anak dan orang muda dengan atau tanpa disabilitas atau yang mengalami kesulitan belajar di sekolah.

Inklusif mengacu pada penempatan anak-anak penyandang disabilitas dengan klasifikasi ringan, sedang maupun berat pada sistem pembelajaran reguler (Staub & Peck, 1994/1995). Inklusi menyajikan sarana dimana upaya sekolah untuk memperlakukan semua murid sebagai individu dengan mempertimbangkan dan menata organisasi, penyediaan kurikulum serta mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan sehingga sekolah mengembangkan kapasitas dalam menerima semua murid dari kalangan masyarakat setempat yang ingin terlibat sehingga dapat mengurangi tingkat pengecualian murid (Sebba & Sachdev, 1997). Mangunsong (2009) menjelaskan bahwa peserta didik dengan kebutuhan khusus merepresentasikan seorang anak dengan kondisi tidak seperti kondisi anak yang normal dengan kategori mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial maupun emosional, kemampuan berkomunikasi, dan anak dengan kebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan berbagai modifikasi terkait tugas belajar, metode belajar, maupun layanan lain guna memperkuat potensi secara lebih optimal.

Tujuan pendidikan inklusif tidak menghapus perbedaan pada anak tetapi untuk memungkinkan semua anak memiliki komunitas pendidikan yang sama. Inklusif dalam pendidikan khusus berarti bahwa sekolah, kelas dan kegiatan dijadwalkan untuk siswa penyandang disabilitas sehingga kesempatan berpartisipasi bagi mereka harus dimaksimalkan (Kochlar, West & Taymans, 2000). Unesco (2009) memandang pendidikan inklusif sebagai proses mengubah sekolah dan pusat pembelajaran untuk mengakomodasi semua peserta didik dengan jenis kelamin pria maupun wanita, pelajar dari suku dan bahasa minoritas, masyarakat desa, bagi yang terkena HIV maupun AIDS, yang mengalami disabilitas, kesulitan dalam belajar dan memberikan peluang belajar. Sarana penunjang yang mendukung pengembangan sistem pendidikan inklusif yang masih sangat minim, pengetahuan dan ketrampilan yang memiliki keterbatasan yang dimiliki oleh pengajar di berbagai sekolah inklusif yang memperlihatkan sistem pendidikan inklusif dalam kondisi yang belum dalam kondisi yang baik. Ditambah lagi pola kurikulum pendidikan yang secara umum belum mengakomodasi banyak mendukung keberadaan anak berkebutuhan khusus atau dengan istilah lain dimana penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif hanya terkesan konsep yang eksperimental (Praptiningrum, 2010).

Hak dan kewajiban layak diberikan dalam kondisi yang sama terhadap siswa yang bersekolah di pendidikan inklusif namun tidak mengistimewakan siswa difabel. Selain itu, pendidikan selayaknya dapat diakses bagi seluruh siswa dalam pendidikan inklusif. Kemudahan seleksi masuk dan fleksibilitas pembelajaran perlu diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus yang menuntut ilmu di sekolah reguler (Somad, 2016). Sistem yang dikembangkan pada pendidikan inklusif erat kaitannya dengan upaya meminimalisir berbagai hambatan yang terjadi pada akses, partisipasi dalam proses pembelajaran khususnya yang mengalami diskriminasi akibat kondisi kemiskinan, disabilitas, jenis kelamin, agama, suku atau adanya ketidaksetaraan lainnya. Pendidikan inklusif berarti menyediakan bagi semua siswa termasuk yang mengalami kendala disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan secara lebih efektif melalui berbagai bantuan yang dibutuhkan dan layanan kondisi ruang belajar yang sesuai guna mempersiapkan siswa menjadi lebih produktif untuk menjadi masyarakat yang utuh dan normal.

Standar dan pengawasan harus diupayakan meningkat sehingga mampu memperkenalkan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Langkah utama dengan mengubah sikap diskriminatif terhadap remaja dan orang dewasa yang memiliki disabilitas (Ajuwon & Sykes, 1988). Pendidikan inklusif secara konsep tidak hanya diwujudkan dalam sistem yang berada di sekolah formal, namun juga selayaknya lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan tiap individu termasuk guna memperkuat kemampuan dan relative lebih ramah terhadap adanya berbagai perbedaan sehingga memungkinkan sekolah inklusi menjadi salah satu cara dalam membentuk karakter (Nurhayati, 2012). Sekolah inklusif harus dilengkapi secara baik pada semua aspek untuk memenuhi dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Termasuk pemanfaatan kurikulum yang seimbang dan sesuai untuk semua kategori anak, guru yang memiliki kemampuan dalam menangani kebutuhan tiap individu di dalam kelas dan mengenalkan lingkungan dalam rangka pengembangan pribadi, keterampilan sosial dan partisipasi siswa yang sangat diharapkan (Balasubramanian, 2012).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dikembangkan ini didesain sebagai penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang sistem pendidikan berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui beberapa langkah diantaranya observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini mengembangkan teknik analisis yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitian dilakukan terhadap lima responden yang merupakan guru pada sekolah berkebutuhan khusus yang berlokasi pada tiga wilayah yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Responden yang terpilih merupakan sampling dalam penelitian ini. Interview secara mendalam dilakukan terhadap responden untuk mengumpulkan dan menggali secara detail data dan informasi yang sangat penting sehingga dari data dan informasi tersebut dapat diketahui dan dapat disimpulkan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan inklusif secara konseptual diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ditambah lagi dengan adanya kontribusi aktif untuk pengembangan karakter bagi siswa dengan kondisi normal sehingga bisa mengembangkan empati dan toleransi guna menghargai adanya perbedaan (Murniarti & Anastasia, 2016). Standar perilaku dan instruksi yang lebih tinggi sehingga siswa dengan klasifikasi khusus memiliki kesempatan untuk mencapai standar optimal serta menjadi peserta didik yang memiliki kemandirian. Hal ini dapat dipercaya bahwa integrasi yang terjadi memungkinkan siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat dari stimulasi penggabungan dengan siswa yang relatif lebih mampu sehingga memiliki kesempatan untuk mendapatkan model yang lebih baik dalam perilaku sosial dan akademik (Elkins, 1998). Smith, Palloway, Patton & Dowdy (2006) menjelaskan manfaat dari inklusi yang menunjukkan bahwa pada tingkat sekolah dasar, siswa penyandang disabilitas dalam kurikulum pendidikan umum bisa mendapatkan manfaat secara sosial dan akademis tanpa menghadapi stigma dengan ruang kelas yang terpisah.

Kurikulum regular pada yang dikembangkan pada model kurikulum bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus diikutkan dan mengacu pada kurikulum regular dan dalam kelas yang sama dengan kelas regular yang dimuat dalam pedoman penyelenggaraan inklusi Direktorat PSLB. Selain itu perlu dikembangkan layanan khusus yang diarahkan untuk bimbingan belajar, motivasi dan ketekunan. Modifikasi perlu dikembangkan pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, dan program tambahan lain yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik lainnya terutama bagi siswa berkebutuhan khusus yang perlu dikembangkan secara bersama-sama bagi tim pengembang kurikulum dengan melibatkan berbagai unsur diantaranya guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan semua stakeholder yang terlibat.

Aspek penting pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus adalah diterimanya keberadaannya dan mereka memiliki sahabat dari teman sekelas. Jenis dukungan apapun akan membantu dalam perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus dan yang dapat membantu mereka untuk memperoleh kepercayaan diri dalam lingkungan sekolah (Balasubramanian, 2012). Tujuan pendidikan inklusif diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau yang memiliki bakat guna memperoleh peluang pendidikan yang bernilai, berkualitas dan bermakna (Murniarti & Anastasia, 2016). Prinsip pendidikan inklusif direncanakan dengan benar dan dilaksanakan sepenuhnya mencakup usia yang tepat dan penempatan kelas, tidak ada kelas atau sekolah khusus, pembelajaran kooperatif dilaksanakan, dukungan pendidikan khusus yang diberikan terhadap pendidikan regular, dan upaya kolaboratif yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada semua yang membutuhkan. Giangreco (1997) mengidentifikasi dimana saja sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Hal ini dapat diklasifikasikan diantaranya dengan adanya kerangka bersama, keterlibatan keluarga, kepemilikan pendidik umum, peran hubungan yang jelas antar profesional, pemanfaatan secara efektif oleh staf pendukung dan prosedur untuk evaluasi terhadap efektivitas.

Pendidikan inklusif dimaknai berhasil apabila mampu mengimplementasikan nilai luhur yang mengacu pada tujuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah (Nurhayati, 2012). Inklusi memiliki manfaat baik akademis maupun sosial bagi seluruh siswa, baik dengan disabilitas maupun tidak, seperti komunikasi dan interaksi sosial yang mempunyai peluang untuk meningkatkannya sehingga model dapat sesuai dengan keterampilan dan perilaku, partisipasi yang

lebih aktif dalam komunitas sekolah, tujuan pendidikan pada tingkat individu serta mendapatkan akses ke kurikulum yang lebih baik (Grenot-Scheyer, Jubala, Bishop & Cootset, 1996). Inklusi memahami bahwa semua peserta didik mendapatkan manfaat dari kurikulum, menantang, dan tepat (Salend, 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa tanpa disabilitas bisa mendapatkan manfaat adanya program inklusif. Persahabatan dan kesadaran adanya keanekaragaman memberikan manfaat pada kelas inklusif bagi individu tanpa disabilitas (Vollmer & Vollmer, 2002).

Pengajaran yang berpusat pada masing-masing individu menjadi poin penting dalam menerapkan sistem pada sekolah inklusif sehingga dibutuhkan kurikulum pendidikan yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak (Nurhayati, 2012). Pada tingkat interpersonal, pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan persahabatan dengan rekan-rekannya dan merasakan adanya perbedaan sosial terkait disabilitasnya. Beberapa orang mempercayai bahwa anak-anak yang ditempatkan di lingkungan kelas standar pada umumnya memiliki harga diri yang lebih tinggi dari pada anak-anak yang terisolasi di kelas yang berbeda hanya karena mereka memiliki kebutuhan khusus (California Special Needs Law Group, 2009). Penerapan sistem pendidikan inklusif terhadap sistem pendidikan memiliki sejumlah keunggulan. Manfaat yang didapatkan diantaranya adalah dapat mendorong siswa yang tidak mengalami disabilitas menerima dan memberikan toleransi kepada anak yang berkebutuhan khusus, meningkatkan sosialisasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, mengurangi biaya penyelenggaraan pendidikan yang terpisah untuk anak-anak dengan atau tanpa kebutuhan khusus, menghilangkan atau mengurangi stigma sosial yang terkait dengan orang-orang dengan kebutuhan khusus, menyediakan pengembangan anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus, dan memungkinkan anak-anak tanpa kebutuhan khusus untuk mengembangkan sikap positif terhadap anak-anak dengan kondisi yang berkebutuhan khusus (Gesinde, 2010).

Restrukturisasi sekolah inklusif perlu dilakukan untuk menjadi komunitas yang mendukung implementasi kebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusif meyakini dimana hidup dan belajar bersama merupakan cara hidup terbaik, menguntungkan, dapat menerima dan responsif setiap kebutuhan anak (Praptiningrum, 2010). Kekhawatiran yang terjadi dalam penyelenggaraan sekolah inklusi bersumber dari orang tua murid dan peserta didik di sekolah regular. Kekhawatiran yang terjadi bahwa siswa difabel memberi pengaruh negatif bagi siswa non-difabel, difabel dapat menular, dan menghambat pembelajaran yang khawatir kredibilitas sekolah akan menurun yang dipersepsikan memiliki kekurangan intelektual (Nurhayati, 2012). Pada dasarnya penerapan pendidikan inklusif setiap anak memiliki perbedaan dan memiliki perbedaan kemampuan, minat, dan bakat sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu perubahan untuk mengakomodir kebutuhan termasuk bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus (Murniarti & Anastasia, 2016). Sekolah perlu melibatkan orang tua siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam menyampaikan evaluasi dan pencapaian prestasi yang bisa dilakukan melalui *parents meeting* secara *face-to-face* atau antara pihak sekolah dengan orang tua sehingga bisa berkontribusi terhadap perkembangan anak (Sartica & Ismanto, 2016).

Pelatihan guru-guru, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik sebagai bagian dari implementasi program kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Kendala yang sering dihadapi dalam pengembangan sistem pendidikan inklusi adalah umumnya terkait dengan pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana belum memadai serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus (Wati, 2016). Dukungan sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan keterampilan dibutuhkan termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus diantaranya untuk mengembangkan interaksi dan sosialisasi dengan peserta didik lain sehingga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keterampilan bagi siswa dengan kebutuhan khusus sehingga berdampak positif bagi siswa (Diahwati, Hariyono & Hanurawan, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Prastiyono, 2013). Pendidikan inklusif memiliki konsekuensi terkait dengan sistem penyelenggaraannya yang dituntut adanya perubahan diawali cara pandang, sikap, sampai proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual (Nugroho & Mareza, 2016). Pendidikan inklusif dapat diwujudkan melalui proses berkelanjutan dengan Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah upaya peningkatan komitmen, kualitas, dan profesionalisme tenaga kependidikan dalam menerapkan pendidikan inklusif yang menjawab kebutuhan individu peserta didik termasuk dalam upaya penyediaan aksesibilitas lingkungan dan alat bantu belajar (Handayani & Rahadian, 2013).

Pendidikan inklusif akan mengalami kegagalan dan tidak sesuai yang diharapkan apabila asumsi bahwa “anak sebagai masalah” masih terus digaungkan (Nurhayati, 2012).

#### 4. Kesimpulan

Guru membutuhkan program pelatihan khusus terkait dengan peran dan kontribusinya dalam pendidikan inklusif agar dalam implementasi dapat membantu siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih efektif dan efisien. Pelatihan khusus bagi guru pada sekolah berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan terutama pada wilayah dimana penelitian ini dilakukan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Menurut Erawati, Sudjarwo & Sinaga (2016) perlunya guru pendamping khusus yang sudah diberikan berbagai pelatihan yang relevan di sekolah inklusi dan perlunya peran orang tua yang aktif untuk mencapai program pendidikan inklusif yang lebih efektif. Kurikulum sekolah sebaiknya dimodifikasi dan diperbaiki untuk mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan khusus karena memiliki model belajar yang berbeda sehingga diharapkan perlunya perubahan sesuai kebutuhan. Peserta didik yang ada dalam sistem pendidikan inklusif diizinkan untuk belajar dengan proses dan kecepatan belajar sesuai kemampuan mereka sendiri karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru sebagai sumber daya yang terlatih dalam menangani anak dengan kebutuhan khusus harus bekerja dengan baik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengoptimalkan sistem pendidikan. Konsep pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan Pendidikan bagi semua (*education for all*) menjadi konsep pendidikan inklusif dengan harapan tanpa ada seorangpun yang tertinggal dalam layanan pendidikan (Murniarti & Anastasia, 2016). Yang penting dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi guru yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengembangkan kompetensi peserta didik yang mengacu pada kebutuhan individu, serta menciptakan lingkungan dan fasilitas yang aksesibel (Handayani & Rahadian, 2013).

Adanya hambatan untuk menyiapkan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus pada kelas reguler terkait disabilitas dan orang penyandang disabilitas yang dirasakan dapat menghambat pendidikan dalam masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka dapat memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki pengalaman yang khas dengan menjalani pendidikan inklusif bersama dengan teman mereka yang normal atau teman sekelas yang tidak mengalami disabilitas. Hambatan pendidikan inklusif dapat diatasi dengan menciptakan kesadaran tentang pengertian inklusi dan manfaatnya bagi masyarakat dan sekolah dengan sumber daya yang ada dan dengan kemampuan mengembalikan struktur kurikulum dalam memenuhi semua kalangan siswa serta dengan merekrut guru yang memiliki keterampilan dan kemahiran guna memenuhi tuntutan siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas dan perlunya dukungan dari keluarga. Menurut Lubis (2016) bahwa ketersediaan guru pendamping khusus yang dirasakan masih kurang mencukupi sehingga menjadi penghambat keberlangsungan sekolah inklusif sehingga dibutuhkan solusi dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada guru sehingga mampu memahami cara mendidik anak berkebutuhan khusus sesuai karakteristiknya.

Adanya diskriminasi terkait perbedaan kemampuan sehingga guru sensitifitas yang tinggi terhadap siswa berkebutuhan khusus (Nugroho & Mareza, 2016). Bagi institusi pendidikan dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus harus dilakukan pemerataan baik berupa akses maupun peluang yang menjamin keberhasilan diharapkan memiliki dan kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan dan integrasi di masyarakat. Menurut Somad (2016) bahwa keberagaman di dalam masyarakat diperkenalkan dalam sistem pendidikan inklusif dimana peserta didik perlu diajarkan untuk menerima dan menghargai orang lain dalam kedudukan yang sejajar yang dikondisikan untuk memiliki kepekaan dan empati terhadap siswa berkebutuhan khusus serta dilatih untuk hidup di lingkungan yang plural. Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia yang ditandai dengan upaya menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, hal ini bisa diimplementasikan pada sekolah inklusi sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral (Nurhayati, 2012).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajuwon, P. M. (2008). Inclusive Education for Students With Disabilities in Nigeria: Benefits, Challenges and Policy Implications. *International Journal of Special Education*, pp. 11-17.
- Balasubramanian, A. (2012). Inclusive education for children with special needs The Hindu Retrieved. Diakses dari <http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-opportunities/inclusive-education-for-children-with-special-needs/>
- Bandur, A. (2014), *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain & Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- California Special Needs Law Group. (2009). The Concept of Inclusive Education and Understanding Children with Special Needs. Retrieved from <http://www.csnlg.com/blog/the-concept-of-inclusive-education-and-understanding-children-with-special-needs/>.
- Chika, M. (2011). Case for Inclusive Education in Nigeria Retrieved from <http://whatsupnigeria.blogspot.com/2011/05/>
- Diahwati, R., Hariyono., & Hanurawan, F. (2016). Keterampilan Sosial Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 8, pp. 1612-1620.
- Elkins, J. (1998). The school context. In A. Ashman & J. Elkins (Eds.), *Educating children with special needs* (3rd ed., pp. 67 – 101). Sydney: Prentice Hall.
- Erawati., I. L., Sudjarwo., & Sinaga, R. M. (2016). Pendidikan Karakter Bangsa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusif. *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 4 No. 1, pp. 20-29.
- Gesinde, M. A (2010) Inclusive Education: Problems, and Remedies 102 - 105 in Theo- Ajobiewe, Adebisi B. A and Olubela O. L (2010) Professional Standard of Practice for Special Educators Retrieved. <http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/>
- Giangreco, M. F. (1997). Key lessons learned about inclusive education: summary of the 1996 Schonell Memorial Lecture. *International Journal of Disability, Development and Education*, Vol. 44 No.3, pp. 193-206.
- Grenot-Scheyer, M., Jubala, K. A., Bishop, K. D., & Coots, J. J. (1996). *The inclusive classroom*. Westminster: Teacher Created Materials Inc.
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 39 No. 1, pp. 27-48.
- Kochhar, C. A., West, L. L., & Taymans, J. M. (2000). *Successful Inclusion. Practical Strategies for a Shared Responsibility*. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall.
- Lubis, E. N. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se-Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. V Edisi 2, pp. 25-36.
- Mangunsong, F. (2009). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: LPSP3 UI.
- Murniarti, E., & Anastasia, N. Z. (2016). Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi dan Strategi. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, pp. 9-18.
- Nugroho, A., & Mareza, L. (2016). Model dan Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa*, Vol. 2 No. 2, pp. 145-156.

- Nurhayati, P. Y. (2012). Mewujudkan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1, pp. 103-118.
- Okobah, U. M. (2007). The What and How of Inclusive Education in the UBE. E. D. Ozoji and J. M. Okuoyibo (Eds.), *The Practice and Future of Special Needs Education in Nigeria* (pp.37 - 51). Jos: Deka Nigeria.
- Osakwe, R. N. (2010). Education for People with Special Needs in Nigeria: Challenges and Way Forward” in M. I. Atinmo, J. B. Babalola, O. A. Moronkola and A. I. Atanda. Eds. *Education for Sustainable Development*. Faculty of Education, University of Ibadan, pp. 33-43.
- PBB. (2011). Fact sheet on Youth with Disabilities. Diakses dari <http://social.un.org/youthyear/docs/>
- Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Praptiningrum, N. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, Vol. 7 No. 2, pp. 32-39.
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11 No. 1, pp. 117-128.
- Rabassa, S. E., & Olivieri, O. (2011). The Poverty Impacts of Climate Change: A Review of the Evidence, Policy Research Working Paper 5622 and the World Bank.
- Salend, S. J. (2005). *Creating inclusive classrooms: Effective and reflective practices for all students* (5th ed.). Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
- Sartica, D., & Ismanto, B. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, pp. 49-66.
- Sebba, J., & Sachdev, D. (1997). *What works in inclusive education*. Barnardo's: Essex.
- Smith, T. E. C., Polloway, E. A., Patton, J. R., & Dowdy, C. A. (2006). *Teaching students with special needs in inclusive settings*, (revised IDEA edition). Boston: Allyn & Bacon.
- Somad, A. (2016). Model Pendidikan Inklusif. *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 1 No. 2, pp. 343-358.
- Staub, D., & Peck, C. (1994/95). What are the outcomes for nondisabled students? *Educational Leadership*, Vol. 52 No. 4, pp. 36-40. Retrieved from [http://staff.pausd.org/~areyes/B\\_Park\\_Inclusion/](http://staff.pausd.org/~areyes/B_Park_Inclusion/)
- Suryaningrum, C., Ingarianti, T. M., & Anwar, Z. (2016). Pengembangan Model Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Psikologi Terapan*, Vol. 04 No.01, pp. 62-74.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Unesco. (2009). *New Unesco Guidelines on Inclusive Education*. Paris: Unesco.
- Wati, E. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XIV No. 2, pp. 368-378.
- Vollmer, R., & Vollmer, J. R. (2002). *Engaging Students in the Inclusive Classroom: Research and Theoretical Underpinning* Retrieved from [http://www.sagepub.com/upm-data/39528\\_Pages\\_from\\_Green\\_ch1.pdf](http://www.sagepub.com/upm-data/39528_Pages_from_Green_ch1.pdf).